

**POLITIK PARIWISATA : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA MENDATTE DI KABUPATEN ENREKANG**



GALIH QRISNANDA QALBUADI

E041201004



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**POLITIK PARIWISATA : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA MENDATTE DI KABUPATEN ENREKANG**

GALIH QRISNANDA QALBUADI

E041201004



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**POLITIK PARIWISATA : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA MENDATTE DI KABUPATEN ENREKANG**

**GALIH QRISNANDA QALBUADI
E041201004**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada

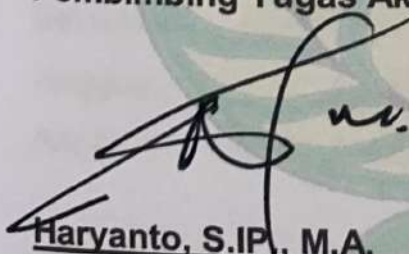
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****POLITIK PARIWISATA : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA MENDATTE DI KABUPATEN ENREKANG****GALIH QRISNANDA QALBUADI****E041201004**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana S1 pada 30 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu
Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar**

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Haryanto, S.IP., M.A.

NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

NIP. 19791218 200812 2 002

HALAMAN PENERIMAAN**SKRIPSI****POLITIK PARIWISATA : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
DESA WISATA MENDATTE DI KABUPATEN ENREKANG****GALIH QRISNANDA QALBUADI****E041201004**

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir., S.IP., M.Si
Sekretaris : Haryanto, S.IP., M.A.
Anggota : Prof. Dr. Phill. Sukri, S.IP., M.Si
Anggota : Dian Ekawaty, S.IP., M.A.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Politik Pariwisata : Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Mendatte Di Kabupaten Enrekang" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Haryanto, S.IP., M.A. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Mei 2024

Yang Menyatakan,



GALIH QRISNANDA QALBUADI

E041201004

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan skripsi ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan bapak Haryanto, S.IP., M.A. selaku pembimbing dan kepada Alm. Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Kepada ibu tercinta Dra. Radia saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana serta para dosen Departemen Ilmu Politik.

Akhirnya, penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Keluarga Besar Nene Battoa, sahabat Diah Fitrianty, Nurhayati, Pista, dan teman lainnya yang ada di Ilmu Politik atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Penulis,

GALIH QRISNANDA QALBUADI

ABSTRAK

GALIH QRISNANDA QALBUADI. **Politik Pariwisata : Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Mendatte Di Kabupaten Enrekang** (dibimbing oleh Haryanto).

Latar belakang. Dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan maka Pemerintah Kabupaten Enrekang menetapkan Desa Mendatte di Kecamatan Anggeraja sebagai Desa Wisata. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Mendatte di Kabupaten Enrekang. **Metode.** Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Mendatte telah sesuai dengan Perda Kabupaten Enrekang No. 8 Tahun 2017 dan SK Bupati Enrekang No. 602/KEP/VII/2021 dalam arah pembangunan pariwisata berbasis alam. Sumber daya manusia dipersiapkan dengan baik agar dapat menjadi pengelola objek wisata dengan mengikuti standar pelayanan yang baik. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kesungguhan untuk mengembangkan Desa Wisata Mendatte. Pihak Pemerintah Desa Mendatte dan masyarakat Desa Mendatte merasa senang dan menyambut dengan baik pengembangan desa wisata yang dilakukan. Seluruh komponen menjalin komunikasi dengan baik dan lancar karena masing-masing menempatkan dirinya dengan baik. Pengembangan Desa Wisata Mendatte dapat dikatakan berjalan dengan baik karena didukung oleh masyarakat, pemerintah desa, dan tentunya Pemerintah Kabupaten Enrekang. **Kesimpulan.** Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam bentuk Desa Wisata Mendatte telah berjalan dengan baik dan menciptakan dampak pembangunan dan kemajuan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci : politik pariwisata; kebijakan pariwisata; implementasi kebijakan; desa wisata

ABSTRACT

GALIH QRISNANDA QALBUADI. **Tourism Politics: Mendatte Tourism Village Development Policy in Enrekang Regency** (supervised by Haryanto).

Background. In realizing tourism development, the Enrekang Regency Government designated Mendatte Village in Anggeraja District as a Tourism Village. **Aims.** This research aims to determine the implementation of government policies in supporting the development of the Mendatte Tourism Village in Enrekang Regency. **Method.** The type of research used is qualitative descriptive research. Data collection was carried out through interviews and documentation. **Results.** The results of this research indicate that the development of Mendatte Tourism Village is in accordance with Enrekang Regency Regional Regulation No. 8 of 2017 and Enrekang Regent's Decree No. 602/KEP/VII/2021 in the direction of nature-based tourism development. Human resources are well prepared so they can manage tourist attractions by following good service standards. The Enrekang Regency Youth Sports and Tourism Service carries out its duties well and seriously to develop the Mendatte Tourism Village. The Mendatte Village Government and the Mendatte Village community were happy and welcomed the development of the tourist village. All components communicate well and smoothly because each of them positions themselves well. The development of the Mendatte Tourism Village can be said to be going well because it is supported by the community, the village government, and of course the Enrekang Regency Government. **Conclusion.** The implementation of tourism development policies in the form of the Mendatte Tourism Village has gone well and created the impact of development and progress as expected.

Keywords: tourism politics; tourism policy; policy implementation; tourism village

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	18
2.2. Politik Pariwisata	21
2.3. Konsep Desa Wisata	23
2.4. Penelitian Terdahulu.....	25
2.5. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2. Teknik Pengumpulan Data	29
3.3. Tipe dan Jenis Penelitian	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	30
3.5. Informasi Penelitian.....	31
3.6. Teknik Analisis Data	32
3.7. Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang	35
4.2. Desa Wisata Mendatte	39
4.3. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	44
4.4. Sumber Daya	49
4.5. Karakteristik Agen Pelaksana	53
4.6. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana	56
4.7. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	58
4.8. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	61
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2. Desa Mendatte.....	39
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2. Data Jumlah Pengunjung Wisata Mendatte Periode 2020-2023 41

Tabel 4.3. Data Pendapatan Pelaku Usaha di Mendatte Periode 2020-2023 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam fokus kebijakan sebuah negara. Dalam upaya memajukan sektor pariwisata, pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan terstruktur. Hal ini penting untuk menarik investasi dan memperluas pasar pariwisata. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat juga harus diperkuat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan pariwisata. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan kerjasama yang kuat, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi negara.

Politik di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan promosi budaya negara. Kebijakan dan strategi pemerintah dalam mempromosikan pariwisata mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan industri. Dengan beragam keindahan alam, kekayaan budaya, dan situs bersejarah, Indonesia mempunyai potensi besar untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia. Namun, tata kelola yang efektif dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjamin pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penting bagi pembuat kebijakan untuk memprioritaskan praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan beretika guna melestarikan warisan alam dan budaya negara ini untuk generasi mendatang.

Perkembangan pariwisata di pedesaan telah mendapatkan momentum yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyak desa di seluruh negeri yang menerapkan bentuk pariwisata berkelanjutan ini. Dengan memanfaatkan warisan budaya yang unik, keindahan alam, dan sumber daya lokal, destinasi pedesaan ini mampu menarik pengunjung yang mencari pengalaman perjalanan yang autentik dan mendalam. Kunci keberhasilan inisiatif desa wisata ini terletak pada keterlibatan masyarakat yang efektif, pembangunan infrastruktur, dan strategi pemasaran. Sekarang ini semakin banyak tumbuh desa wisata di setiap daerah di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten setempat.

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian, serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya. Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan

pemahaman kepariwisataan; mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya; meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. Selanjutnya, komunitas atau masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika berkunjung. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki.

Desa wisata dan objek wisata di desa, keduanya merupakan sesuatu yang berbeda namun acap kali sulit untuk dibedakan. Hari ini, banyak desa yang mengklaim dirinya sebagai desa wisata. Namun ketika ditilik lebih dalam, ternyata hanya berbentuk objek wisata yang berlokasi di desa tanpa memiliki konsep pengembangan sebagai desa wisata. Keberadaan sebuah objek wisata atau dalam bentuk lain berupa event wisata yang diselenggarakan di desa yang menarik wisatawan untuk berkunjung, tidak serta-merta menjadikan desa tersebut disebut sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata tidak bisa dilakukan secara instan, hanya dengan membuat sebuah objek wisata atau menyelenggarakan event wisata di desa. Lebih daripada itu, konsep pengembangan desa wisata harus memenuhi sejumlah unsur penting yang tidak lepas dari peran komunitas atau masyarakat sebagai pelaku penting di dalamnya.

Kabupaten Enrekang yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan, menawarkan keberagaman alam dan kekayaan budaya yang menjadi potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Keindahan alamnya, terdiri dari perbukitan yang hijau, sungai yang jernih, dan kearifan lokal yang tertanam dalam budaya setempat, memberikan daya tarik yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pariwisata. Melihat potensi ini, muncul kebijakan pengembangan desa wisata sebagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan merawat kelestarian alam serta kearifan lokal. Dalam era globalisasi ini, pengembangan desa wisata menjadi suatu pilihan untuk menjawab tuntutan perkembangan dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di daerah.

Kabupaten Enrekang, sebagai salah satu daerah di Indonesia, tidak luput dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Dalam upaya pemulihan ekonomi, Kabupaten Enrekang menetapkan objek pariwisata sebagai target unggulannya. Hal ini ditandai dengan ditetapkan 23 Desa Wisata yang telah di

SK-kan Bupati Enrekang dalam SK Bupati Enrekang No. 602/KEP/VII/2021 pada tanggal 13 Juli 2021 sebagai desa wisata alam dan sejarah. Hal ini sesuai dengan usaha dan keinginan Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang yang menargetkan bangkitkan ekonomi melalui sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19.¹ Salah dari desa wisata tersebut adalah desa wisata Mendatte.

Desa Mendatte di Kecamatan Angeraja Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Desa Wisata yang ditetapkan oleh Bupati Enrekang berdasarkan SK No. 602/KEP/VII/2021 pada tanggal 13 Juli 2021 sebagai desa wisata alam dan sejarah. Destinasi wisata yang saat ini dikembangkan di desa Mendatte adalah kawasan wisata alam Mendatte Park dengan ketinggian 500 sampai 1.200 meter dari permukaan laut. Mendatte Park berupa Taman Wisata Alam Butlas, kolam renang, taman rekreasi Camping, Hiking dan Swafoto yang dikelola oleh Pemerintah Desa Mendatte melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu BUMDes Makinawa. Kawasan wisata ini diapit oleh gugusan pegunungan kars yakni deretan tebing Bambapuang di sebelah barat dan deretan Gunung Nona di sebelah bagian timur. Sebagaimana karakteristik Kabupaten Enrekang berupa gugusan pegunungan, sehingga Pengembangan wisata Mandatte Park di Kabupaten Enrekang pada umumnya telah memperhitungkan keamanan dan keselamatan wisatawan, sehingga wisatawan merasa nyaman menikmati pesona keindahan alam.

Pengembangan desa wisata merupakan inisiatif yang kompleks dan tidak mudah dilakukan, terutama dalam konteks Kabupaten Enrekang. Meskipun potensi pariwisata Kabupaten Enrekang sangat besar, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Proses pengembangan desa wisata melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Kebijakan desa wisata menjadi elemen kritis dalam konteks ini. Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik unik dan kearifan lokal yang perlu dijaga dan ditempatkan di tengah-tengah upaya pengembangan.

Dengan adanya dorongan global untuk praktik ekowisata dan pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengembangan desa wisata dapat menjadi jawaban untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Pentingnya konteks lokal dalam pembangunan desa wisata tidak dapat diabaikan. Kebijakan pengembangan desa wisata harus

¹ Said, N. R. (2021). 23 Desa di Enrekang Disiapkan Jadi Desa Wisata. <https://rakyatku.com/read/206519/23-desa-di-enrekang-disiapkan-jadi-desa-wisata>. Diakses pada tanggal 19 September 2023.

memahami dinamika masyarakat Enrekang, melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaannya. Hal ini, membuka peluang untuk memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan rasa kepemilikan terhadap pengembangan desa wisata, dan memastikan penerimaan positif dari masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam kebijakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“POLITIK PARIWISATA: KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA MENDATTE DI KABUPATEN ENREKANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Mendatte di Kabupaten Enrekang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu : Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Mendatte di Kabupaten Enrekang, jika dilihat dari enam faktor yakni ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; kekarakteristik agen pelaksana; sikap atau kecenderungan para pelaksana; aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pariwisata di Kabupaten Enrekang. Data ataupun informasi yang akan diperoleh dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Enrekang.
- b. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang pada bidang kebijakan pariwisata dan politik sumber daya alam di tingkat lokal maupun nasional.
- c. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan yang mengkaji bagaimana kebijakan

pariwisata yang dihasilkan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang tepat guna dan lestari.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai kebijakan pariwisata terhadap desa wisata.
- b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang kebijakan pariwisata terkhusus desa wisata. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori implementasi kebijakan, politik pariwisata, dan konsep desa wisata sebagai landasan teoritis dan alat analisis utama untuk melihat proses dan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan desa wisata Mendatte di Kabupaten Enrekang. Dalam bab ini, diuraikan pula kerangka berpikir penelitian ini yang tergambarkan dalam skema pikir. Untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

2.1. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn merumuskan Model pendekatan top-down dan dianggap menggunakan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses Implementasi tersebut pada dasarnya berlangsungnya Interaksi dengan variable dan abstraksi atau performansi dengan kesengajaan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang baik dari suatu pengaplikasian kebijakan. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dan keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.²

Rian Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementsi menyangkut tindakan seberapa jauharah yang telah diprogramkan itu benar- benar memuaskan. Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 : 99) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Berdasarkan konsep *A Model of The Policy Implementation* yang dikemukakan oleh Van Matter dan Van Horn Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sukses apa bila terdapat 6 variabel, yaitu :

² Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Akan sulit merealisasikan kebijakan publik bila ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada taraf warga. Ukuran dan tujuan dari kebijakan publik memang realistis menggunakan sosio kultur yang mengada pada taraf pelaksana kebijakan agar taraf keberhasilan kinerja implementasi kebijakan bisa diukur.

2. Sumber Daya

Kemampuan memanfaatkan sumber daya organisasi bisa menentukan tingkat keberhasilan proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan secara politik menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas pada langkah-langkah tertentu dari keseluruhan proses implementasi sehingga baik atau buruknya kinerja kebijakan publik yang diharapkan tergantung pada kompensasi dan kapabilitas sumber daya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada agen pelaksana pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan publik pada organisasi formal dan informal merupakan pusat perhatian para agen pelaksana sehingga ciri-ciri yang sempurna dan tepat dengan para agen pelaksana akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan publik pula dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. Hal ini sangat mungkin terjadi lantaran kebijakan publik yang dilaksanakan bukanlah hasil menurut formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun kebijakan yang akan implementor laksanakan merupakan kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak sanggup menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi

Syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung dari mekanisme koordinasi. Implementasi yang baik ditentukan dari koordinasi dan komunikasi yang baik pula begitupun sebaliknya. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yakni tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh disini harus akurat dan berdasarkan sumber yang pasti. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat dan benar.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan kebijakan publik pula di dorong oleh lingkungan eksternal. Seperti lingkungan politik, sosial, & ekonomi. Lingkungan yang tidak aman bisa mengakibatkan kegagalan kinerja implementasi. Keikutsertaan lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali.

Ruang lingkup implementasi memang sangat luas sehingga membuatnya terlihat spesial dan sering menghadapi persoalan terkait pencapaiannya, apakah tergolong berhasil atau sebaliknya dianggap gagal. Ruang lingkup implementasi menjadi sangat luas karena ia bukan sekedar sebuah pelaksanaan dalam arti

rangkaian tindakan lanjutan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Rangkaian tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien, harus ekonomis dan membawa hasil atau manfaat bagi mereka yang menjadi sasaran atau target kebijakan. Oleh karena itu ketepatan atau akurasi kebijakan menjadi penting agar kebijakan yang berhasil dilaksanakan itu tidak menyimpang dari sasarannya.

2.2. Politik Pariwisata

Politik pariwisata adalah dua proses yang menghubungkan konsep politik dan konsep pariwisata. Dalam kajian akademis, politik selalu dikaitkan dengan istilah *politics* atau *policy*. Makna dari *politics* menurut Plato dan Aristoteles menganggap sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*).³ Pengembangan suatu bidang tidak akan terlepas dari proses politik begitupula dengan bidang pariwisata.

Pariwisata itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kegiatan-kegiatan politik suatu negara dimana industri pariwisata itu dijalankan. Kenyataannya hubungan antara politik dan pariwisata itu tercermin dalam kegiatan aparatur dan organisasi pemerintah dalam keseluruhannya serta bentuk anggapan umum yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan, norma-norma, syarat-syarat, larangan-larangan dan sebagainya yang kemudian dipercayakan pada instansi, badan, organisasi untuk melaksanakan segala tugas yang terumuskan di dalamnya serta memberi interpretasi kepadanya sehingga terwujud fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam memajukan industri pariwisata dalam keseluruhannya sehingga timbullah kebijaksanaan pariwisata (*policy of tourism*).⁴

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah serta pengusaha. Dan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

³ Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

⁴ Mistriani, N & Pratamaningtyas, O. W. (2020). Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Melalui Penawaran dan Permintaan dalam Pariwisata di Grand Maerakacaa Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol 16, No. 13

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Muljadi, 2009:7). Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan paguyuban organisasi sosial.

Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan penggantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuh terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat sebagai hasil dari berkembangnya hasil perkembangan niaga, industri dan transportasi.⁵

Secara umum, kebijakan kepariwisataan sebagai bagian dari kebijakan negara yang berpengaruh positif terhadap kondisi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pariwisata di Indonesia, di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang bertujuan untuk melakukan perubahan di sektor pariwisata yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Kebijakan pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan pertumbuhan industri pariwisata, yang seringkali menjadi salah satu pilar ekonomi utama bagi banyak negara. Salah satu aspek kunci dari kebijakan pariwisata adalah pengembangan ekonomi. Dengan menarik wisatawan,

⁵ Riani, N. K. (2021). Pariwisata adalah Pisau Bermata 2. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 No. 5

sektor pariwisata dapat menciptakan pendapatan yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi dalam infrastruktur pariwisata.

Selain itu, kebijakan ini mencakup upaya pelestarian lingkungan dan budaya. Di samping pertumbuhan ekonomi, pelestarian warisan alam dan budaya adalah prioritas penting dalam banyak kebijakan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak merusak lingkungan dan warisan budaya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pada tingkat lokal, setiap daerah memiliki kebijakan pariwisata yang berbeda, tergantung pada potensi dan karakteristik wisata setempat. Kebijakan pariwisata juga melibatkan strategi promosi dan pemasaran destinasi pariwisata untuk menarik wisatawan. Ini termasuk promosi di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik destinasi tertentu.

Politik pariwisata merujuk pada kebijakan, strategi, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas yang terlibat dalam pengaturan sektor pariwisata suatu negara atau wilayah. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengembangan destinasi wisata, promosi pariwisata, pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur pariwisata, regulasi industri pariwisata, serta pengaturan dan pengawasan aktivitas pariwisata. Politik pariwisata dapat melibatkan keputusan mengenai alokasi sumber daya, penentuan arah pengembangan pariwisata, penetapan standar keamanan dan kualitas, pembentukan kerja sama dengan sektor swasta dan pihak terkait lainnya, serta upaya untuk mempromosikan keberlanjutan dan keadilan dalam industri pariwisata.

Tujuan politik pariwisata bisa beragam, mulai dari meningkatkan pendapatan negara melalui industri pariwisata, mempromosikan kekayaan budaya dan alam suatu daerah, hingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan melestarikan lingkungan. Implementasi politik pariwisata juga dapat mempengaruhi tata kelola pariwisata, struktur industri, dan pengalaman wisatawan.

Dalam konteks desa wisata seperti Mendatte, politik pariwisata mencakup kebijakan dan program yang didesain untuk mengembangkan dan mempromosikan desa sebagai destinasi wisata, serta upaya pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata secara berkelanjutan.

2.3. Konsep Desa Wisata

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda. Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata.

Muliawan (2008) menyatakan bahwa prinsip pengembangan desa wisata dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, menguntungkan masyarakat setempat, berskala kecil untuk memudahkan terjadinya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, melibatkan masyarakat setempat dan menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh desa wisata dapat dimanfaatkan menjadi suatu objek wisata yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dan akan menjadikan desa itu berkembang.⁶ Destinasi wisata di kawasan pedesaan bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan kehidupan tradisional serta keunikan budaya lokal. Dalam desa wisata, pengunjung dapat mengalami secara langsung kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan, termasuk tradisi, kerajinan tangan, dan kearifan lokal. Pengembangan desa wisata tidak hanya berfokus pada aspek pariwisata semata, melainkan juga pada pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan di tingkat lokal.

Keberhasilan desa wisata sering kali terkait erat dengan partisipasi aktif masyarakat setempat. Melibatkan penduduk desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan promosi desa wisata dapat menciptakan dampak positif secara ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, masyarakat lokal dapat mengembangkan *homestay* atau warung makan tradisional, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pelestarian warisan budaya mereka. Dengan pendekatan berkelanjutan, desa wisata dapat menjadi model yang baik untuk melestarikan kekayaan budaya dan alam sambil menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

⁶ Charunnisa, S. F & Yuningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Jurnal Universitas Diponegoro

2.4. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa studi tentang kebijakan pariwisata yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

Pertama, penelitian oleh Inti Krisnawati dengan judul Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menemukan bahwa kriteria desa wisata penting diperhatikan dan perlu dipergunakan dengan baik sebagai skrining desa wisata karena kriteria merupakan instrument penting dalam pengembangan desa wisata. Terlebih mengingat bahwa untuk mengembangkan sebuah desa wisata dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dana yang diperlukan untuk meningkatkan sarana prasarana pendukung desa wisata tentunya cukup besar, disamping dana untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelolanya. Agar dana yang digelontorkan pemerintah tidak sia-sia, dan supaya nantinya desa-desa yang diajukan menjadi desa wisata lebih mudah dikembangkan menjadi desa wisata unggul, masyarakat perlu memahami persyaratan yang diminta sebelum mengajukan desanya menjadi desa wisata. Sesuai dengan ketetapan pemerintah, tiga komponen penting yang perlu dimiliki setiap calon desa wisata secara ringkas yaitu melihat adanya potensi wisata, melihat adanya minat dari masyarakat dan terakhir melihat adanya keunikan yang dimiliki suatu desa yang membedakannya dengan desa yang lainnya.⁷

Kedua, penelitian oleh Surahman. B dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja Enrekang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menemukan bahwa Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata alam Lewaja di Kabupaten Enrekang oleh pemerintah (Dispora) yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Melakukan pembangunan toilet, ruang ganti, musholla, kios kuliner, kios souvenir, ruang parkir dan pagar, dan sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan Kabupaten Enrekang juga sudah menggunakan sistem sosial media, sistem promosi dengan melalui media telekomunikasi dan media cetak. Di

⁷ Krisnawati, I. (2021). Program Pengembangan Desa Wisat Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol 4, No. 2 Hal. 211-221

samping itu jalan menuju objek wisata tersebut sudah baik. Tetapi dalam hal pengembangan utilitas fasilitas pariwisata perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karna masalah dana dalam pengelolaannya masih kurang sehingga mengakibatkan adanya hambatan dalam penanganannya. Kemudian, pihak kedua atau penanggung jawab dalam mengelola pariwisata alam lewaja melakukan pemeliharaan permandian alam lewaja sebaik mungkin dan melakukan promosi daya tarik wisata melalui media seperti telekomunikasi, sosial media maupun media cetak. Guna menarik wisatawan untuk berkunjung ke permandian Alam Lewaja.⁸

Ketiga, penelitian oleh Hasnawati dengan judul Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Malino Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menemukan bahwa dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah baik dilihat dari segi banyaknya fasilitas penunjang yang disediakan pemerintah daerah di kawasan Malino, fasilitas ini digunakan oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung dan wisatawan yang berkunjung. Kelembagaan dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa bahwa peran masing-masing dalam mendukung tercapainya kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah baik dilihat dari adanya suatu kegiatan semua pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Malino ikut terlibat salah satu contoh adalah Beautiful Malino yang biasa dilaksanakan pada bulan Juli.⁹

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai indikator untuk melihat bagaimana bentuk implementasi Perda Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 pada Desa Wisata Mendatte oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah dalam memahami tujuan dan maksud dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Mendatte di Kabupaten Enrekang.

⁸ Surahman. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja Kabupaten Enrekang*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar)

⁹ Hasnawati. (2020). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Malino Kabupaten Gowa*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar)

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas bahwa kebijakan pariwisata adalah kerangka strategis yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur, mengembangkan, dan mempromosikan sektor pariwisata dalam suatu wilayah atau negara. Ini mencakup serangkaian langkah-langkah, rencana, dan regulasi yang dirancang untuk mencapai berbagai tujuan terkait pariwisata. Kebijakan pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan pertumbuhan industri pariwisata, yang seringkali menjadi salah satu pilar ekonomi utama bagi banyak negara. Salah satu aspek kunci dari kebijakan pariwisata adalah pengembangan ekonomi. Dengan menarik wisatawan, sektor pariwisata dapat menciptakan pendapatan yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi dalam infrastruktur pariwisata.

Sektor pariwisata menjadi salah satu target utama di Kabupaten Enrekang, buktinya ada sebanyak 23 desa di Kabupaten Enrekang yang ditetapkan menjadi desa wisata oleh Bupati Enrekang. Salah satunya yaitu desa wisata Mendatte. Desa Mendatte adalah salah satu desa yang terletak di lembah "Suruganna Bambapuang" daerah ini diapit oleh gugusan pegunungan kars yakni deretan tebing Bambapuang dan di sebelah barat dan deretan Gunung Nona di sebelah bagian timur. Secara administratif Desa Mendatte terletak di Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang. Potensi wisata alam sangat menjanjikan dalam pengembangan desa wisata yang mandiri, sebab beberapa potensi yang dimiliki diantaranya, aksesibilitas lokasi yang terletak di pinggiran jalan poros/trans provinsi Enrekang-Makale, Gunung Nona, Tebing Bambapuang, Sungai Mata Allo, dan Bunker Jepang adalah sekian dari beberapa potensi alam yang terdapat di desa ini.

Berdasarkan penjelasan tadi, penulis ingin mengetahui bagaimanakah proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten dalam membangun pariwisata baik dari pihak pemerintah dan ataupun masyarakatnya. Proses implementasi ini akan dianalisis dalam kerangka teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, karena bisa dilihat dalam waktu yang sangat cepat pemerintah mampu menjadikan Enrekang dari kota yang awalnya lebih dikenal sebagai daerah pertanian mulai juga dikenal menjadi daerah wisata yang menjadi salah satu andalan baru di Kabupaten Enrekang ini.

Skema Kerangka Berpikir

